

Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Jatiuwung

Kota Tangerang: Tantangan dan Urgensi Evaluasi Program

Implementation of Inclusive Education in Public Elementary Scholls in Jatiuwung District,

Tangerang City: Challenges and Urgency of Program Evaluation

Adzka Azzamulhaq¹, Asep Supena², Indra Jaya³

Universitas Negeri Jakarta

E-mail: adzkaazzamulhaq@gmail.com, asupena@unj.ac.id, indrajaya@unj.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan inklusif adalah upaya guna memberikan kesempatan belajar yang setara untuk seluruh peserta didik tanpa terkecuali, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Walaupun berbagai kebijakan terkait pendidikan inklusif sudah diterapkan di Indonesia, implementasinya di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada aspek sumber daya manusia, saran dan prasarana, serta pengelolaan program pendidikan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang dan menelaah urgensi evaluasi program dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang masih menghadapi berbagai tantangan, yakni keterbatasan kompetensi guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus, keterbatasan guru pendamping khusus, kurangnya sarana dan prasarana yang aksesibilitas, serta belum optimalnya pengelolaan program pendidikan inklusif di sekolah, maka dari itu, evaluasi program menjadi poin penting untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusif serta sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan pengembangan layanan pendidikan inklusif yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Implementasi Pendidikan, Evaluasi Program, Sekolah Dasar

Korespondensi:

Adzka Azzamulhaq. Universitas Negeri Jakarta. Jakarta. Email: adzkaazzamulhaq@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah hak dasar bagi semua warga negara yang wajib dipenuhi tanpa adanya diskriminasi. Setiap peserta didik mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam konteks tersebut, pendidikan inklusif menjadi salah satu pendekatan yang menegaskan pentingnya pelaksanaan pendidikan yang bisa mengakomodasi keberagaman peserta didik dalam satu lingkungan belajar yang sama. Menurut UNESCO (2020), pendidikan inklusif tidak hanya memberikan akses pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, namun juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang menghargai keberagaman serta memberikan kesempatan belajar yang setara untuk semua peserta didik.

Di Indonesia, komitmen terhadap pendidikan inklusif terlihat dalam berbagai kebijakan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai sarana utama untuk menciptakan keadilan sosial. Pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat daerah menjadi indikator penting kesuksesan kebijakan tersebut. Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program nyata yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Tanpa dukungan dan pengelolaan yang optimal di tingkat daerah, tujuan pendidikan inklusif berpotensi tidak tercapai secara maksimal (Anwar, 2025).

Pendidikan inklusif di Kota Tangerang adalah sebuah langkah strategis pemerintah daerah dalam memberikan layanan pendidikan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, pemerintah juga membuat peraturan yang secara khusus mengatur pemenuhan layanan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang menekankan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan dukungan anggaran, penyediaan saran dan prasarana yang ramah bagi peserta didik

berkebutuhan khusus, penyiapan pendidik dan tenaga kependidikan, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus (Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 2020).

Program pendidikan inklusif di Kota Tangerang ini baru dimulai secara resmi pada Tahun Ajaran 2021/2022, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor 800/Kep.0178-Dispendik/2021 tentang penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI). Dengan demikian, Kota Tangerang termasuk daerah yang relatif terlambat dibandingkan daerah lain dalam melaksanakan program pendidikan inklusif.

Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait konsep pendidikan inklusif (Ramadhan et al., 2024). Dalam kajian teknis pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Layanan Khusus Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Tangerang (2024), disampaikan bahwa meskipun sudah berlangsung selama kurang lebih lima tahun, pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Tangerang masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, baik dari aspek peserta didik, orang tua, tenaga pendidik, maupun sistem kebijakan pemerintah daerah.

Berangkat dari gambaran umum penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Tangerang tersebut, Kecamatan Jatiuwung menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Kecamatan ini mempunyai beberapa Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI), yakni SDN Gandasari 1, SDN Pasir Jaya 2, SDN Keroncong Mas Permai, SDN Jatake 3, dan SDN Jatake 4, dengan karakteristik peserta didik yang beragam serta latar belakang sosial ekonomi masyarakat yang heterogen. Dalam pelaksanaannya, sekolah-sekolah inklusif di Kecamatan Jatiuwung menghadapi berbagai tantangan yang serupa dengan kecamatan lain, tetapi juga memiliki dinamika lokal tersendiri, seperti proses penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus baru yang meskipun telah tersedia jalur afirmasi dengan kuota 2,5%, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dalam proses asesmen awal, penempatan peserta didik, serta penyesuaian kapasitas sekolah terhadap jumlah pendaftar. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme seleksi dan kebutuhan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem layanan di sekolah. Kemudian keterbatasan jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK), variasi kesiapan sekolah, serta perbedaan dukungan orang tua dan lingkungan sekitar. Menurut Ainscow (2020), berbagai tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bisa muncul dari berbagai faktor seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun kelembagaan. Tantangan tersebut bisa memengaruhi akses, partisipasi, serta pencapaian belajar peserta didik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif tidak hanya membutuhkan kebijakan, namun juga membutuhkan evaluasi program yang sistematis guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendidikan inklusif sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi program menjadi penting karena bisa memberikan gambaran terkait berbagai tantangan yang terjadi selama penyelenggaraan program serta membantu sekolah dalam menentukan langkah perbaikan yang dibutuhkan. Melalui evaluasi program, efektivitas implementasi pendidikan inklusif bisa diukur sehingga kualitas layanan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus bisa terus dikembangkan.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas terkait implementasi pendidikan inklusif dari aspek strategi pembelajaran, kesiapan tenaga pendidik, maupun layanan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Akan tetapi, kajian yang secara khusus menelaah implementasi pendidikan inklusif dari perspektif urgensi evaluasi program masih relatif terbatas, terutama pada konteks sekolah dasar negeri di wilayah Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Selain itu, penelitian yang menghubungkan tantangan implementasi pendidikan inklusif dengan urgennya evaluasi program sebagai dasar pengembangan layanan pendidikan inklusif juga masih belum banyak dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian yang memperlihatkan pentingnya kajian yang lebih mendalam terkait tantangan implementasi pendidikan inklusif serta urgensi evaluasi program pada tingkat sekolah dasar. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang serta menelaah urgensi evaluasi program sebagai upaya dalam mengembangkan kualitas layanan pendidikan inklusif di sekolah dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami secara lebih mendalam fenomena implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraannya. Metode studi kasus digunakan guna mendapatkan gambaran yang lebih terstruktur terkait implementasi pendidikan inklusif pada konteks tertentu, yakni Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, dan Guru Pendamping Khusus (GPK) pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Pemilihan subjek penelitian tersebut menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan mempunyai pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi pendidikan inklusif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan guna mendapatkan gambaran terkait kondisi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah, termasuk proses pembelajaran, fasilitas pendukung, serta komunikasi antara tenaga pendidik dan peserta didik berkebutuhan khusus. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan penelitian guna mendapatkan informasi terkait berbagai tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif serta mendapatkan informasi terkait pentingnya evaluasi program pendidikan inklusif. Kemudian dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan

implementasi pendidikan inklusif, seperti data peserta didik berkebutuhan khusus, program sekolah, serta dokumen pendukung lainnya.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan membandingkan informasi yang didapatkan dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilaksanakan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan data yang lebih kredibel.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, didapatkan beragam temuan terkait pelaksanaan pendidikan inklusif serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Data penelitian didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan kepada kepala sekolah, guru kelas, dan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah.

Secara umum, sekolah sudah melaksanakan pendidikan inklusif dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pendidikan inklusif dilaksanakan melalui pembelajaran di kelas dengan penyesuaian tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Namun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas program.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yakni keterbatasan kompetensi guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Sebagian guru mengungkapkan bahwa masih mengalami kesulitan dalam memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian kesulitan dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas. Guru juga menyampaikan bahwa pelatihan terkait pendidikan inklusif masih terbatas sehingga hal ini membuat pemahaman terkait program pendidikan inklusif masih belum sepenuhnya optimal.

Selanjutnya yakni, hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran di kelas masih cenderung memakai metode pembelajaran umum yang diimplementasikan kepada seluruh peserta didik tanpa adanya penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam beberapa hal, peserta didik berkebutuhan khusus terlihat mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena materi dan metode pembelajaran masih belum adaptif kepada kebutuhan belajar mereka. Guru juga terlihat mengalami tantangan dalam membagi perhatian antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus dalam satu kelas yang sama.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK) menjadi salah satu hal yang mempengaruhi implementasi pendidikan inklusif di sekolah. Tidak semua sekolah mempunyai Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bisa mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus dengan baik. Akibatnya, sebagai besar tanggung jawab masih ditangani oleh guru kelas, walaupun guru kelas belum sepenuhnya mempunyai kompetensi khusus dalam pendidikan inklusif.

Selain aspek sumber daya manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung pendidikan inklusif di sekolah masih belum memadai. Beberapa sekolah belum mempunyai media pembelajaran adaptif maupun fasilitas khusus yang bisa mendukung kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Berdasarkan hasil observasi, lingkungan sekolah masih dirancang untuk peserta didik reguler sehingga aksesibilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus belum sepenuhnya terpenuhi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan program pendidikan inklusif di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, pelaksanaan pendidikan inklusif sudah menjadi bagian dari program sekolah, tetapi pelaksanaannya belum didukung dengan sistem evaluasi program yang terstruktur dan berkelanjutan. Evaluasi yang dilaksanakan masih bersifat umum dan belum secara khusus menilai efektivitas implementasi pendidikan inklusif di sekolah. Selain itu, koordinasi antara pihak sekolah, guru, dan pihak lainnya dalam pelaksanaan pendidikan inklusif masih belum berjalan dengan baik. Pendampingan terhadap guru dalam melaksanakan pembelajaran masih terbatas sehingga guru sering kali mengalami kesulitan dalam menangani berbagai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas.

Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah menyampaikan bahwa evaluasi program pendidikan inklusif sangat dibutuhkan guna mengetahui berbagai kendala yang terjadi dalam implementasi pendidikan inklusif. Evaluasi program dipandang penting sebagai dasar dalam melaksanakan perbaikan program, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta membantu sekolah dalam menentukan langkah pengembangan pendidikan inklusif di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang sudah dilaksanakan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut berkaitan dengan kompetensi guru, keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK), sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya pengelolaan dan evaluasi program pendidikan inklusif.

PEMBAHASAN

Kompetensi Guru dalam Implementasi Pendidikan Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Guru masih mengalami kesulitan dalam memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus dan

menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan guru sangat mempengaruhi efektivitas implementasi pendidikan inklusif di sekolah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Keefe (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi dan kesiapan guru mempunyai pengaruh besar terkait keberhasilan pendidikan inklusif. Guru yang belum mempunyai pemahaman terkait pendidikan inklusif cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola pembelajaran di kelas yang mempunyai karakteristik kebutuhan peserta didik.

Selain itu, Walton (2025), menyampaikan bahwa pendidikan inklusif membutuhkan kemampuan guru dalam menyesuaikan strategi pembelajaran guna semua peserta didik bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan menjadi hal penting dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif.

Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusif

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pendukung pendidikan inklusif masih belum tersedia dengan baik, baik dalam bentuk media pembelajaran adaptif maupun aksesibilitas lingkungan sekolah.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Slee (2018), yang menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan, namun juga oleh kesiapan lingkungan sekolah dalam mendukung kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana yang kurang memadai bisa menjadi tantangan untuk peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Maka dari itu, sekolah butuh meningkatkan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan inklusif guna proses pembelajaran bisa berjalan dengan lebih efektif dan ramah bagi semua peserta didik.

Pengelolaan Program dan Urgensi Evaluasi Pendidikan Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program pendidikan inklusif di sekolah masih belum berjalan dengan baik. Evaluasi program pendidikan inklusif juga belum dilaksanakan secara sistematis. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sekolah masih membutuhkan evaluasi yang bisa membantu dalam menilai efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusif.

Hal ini sejalan dengan pendapat Stufflebeam (2017), yang menyampaikan bahwa evaluasi program adalah proses sistematis agar mendapatkan informasi yang bisa dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pengembangan program pendidikan. Melalui evaluasi program, sekolah bisa mengetahui berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan pendidikan inklusif serta menentukan arah perbaikan yang dibutuhkan. Evaluasi program juga mempunyai implikasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif, baik dari aspek pembelajaran, pendampingan peserta didik, maupun pengelolaan program pendidikan inklusif secara keseluruhan.

Dengan demikian, evaluasi program menjadi hal yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar untuk implementasinya bisa berjalan dengan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang sudah dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama peserta didik lainnya dalam lingkungan yang sama. Akan tetapi, implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi beragam tantangan, terutama pada aspek kompetensi guru, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan program pendidikan inklusif.

Keterbatasan pemahaman guru terkait pendidikan inklusif, kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK), serta belum optimalnya fasilitas pendukung pembelajaran menjadi hal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusif. Selain itu, evaluasi program pendidikan inklusif di sekolah masih belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan sehingga beragam tantangan dalam implementasi program belum sepenuhnya teridentifikasi dan tertangani dengan baik.

Berdasarkan temuan tersebut, evaluasi program pendidikan inklusif menjadi suatu hal yang urgensi untuk dilaksanakan. Evaluasi program bisa membantu sekolah dalam mengetahui efektivitas implementasi pendidikan inklusif, mengidentifikasi beragam tantangan yang terjadi, serta menjadi dasar dalam melaksanakan perbaikan dan pengembangan layanan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Dengan demikian, evaluasi program mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan inklusif guna bisa berjalan dengan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: lessons from international experiences. *Nordic journals of studies in educational policy*, 6(1), 7-16.
- Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Hasbar, H., Payung, L. T., & Kesuma, A. H. (2025). Evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia: Pendekatan CIPP dan perspektif keadilan sosial. *Journal of Education Research*, 6(3), 739-750.
- Dinas Pendidikan Kota Tangerang. (2024). *Kajian teknis pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) layanan khusus pendidikan*. Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

- Keefe, E. S. (2022). From detractive to democratic: The duty of teacher education to disrupt structural ableism and reimagine disability. *Teachers College Record*, 124(3), 115-147.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Ramadhan, N. J. H., Sutiah, S., & Aziz, A. (2024). The implementation of inclusive education policy in Indonesia: A literature review. *Esteem Journal of English Education Study Programme*, 7(1), 310-317.
- Slee, R., & Tomlinson, S. (2018). *Inclusive education isn't dead, it just smells funny*. Routledge.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Publications.
- Unesco. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education all means all*. UN.
- Walton, E. (2025) *The Knowledge of inclusive education: an ecological approach*. Routledge.